

Efektifitas Partisipasi Finansial Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Yayasan GUPPI Lamongan)

Madekhan¹, Winarto Eka Wahyudi²

^{1,2}Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Lamongan

¹madekhan@unisla.ac.id, ²ekawahyudi1926@unisla.ac.id

Abstract

In the context of education, the whole of society has the possibility to contribute financially to the funding of education. Researchers found this type of participation through the Islamic Education Reform Movement Foundation (GUPPI) as an educational organization that has consistently collected and managed budgets from student guardians to ensure the availability of salaries for teachers and employees at MI Islamiyah Dinoyo. Through a mixed research method with a chain exploration, design, this study seeks to analyze the effectiveness of the management of community financial participation by the Dinoyo GUPPI Foundation in supporting education funding at MI Islamiyah Dinoyo. The results showed that the successful management of public financial participation was supported by the application of the principles of openness, voluntaries, affirmation to poor households, and maintaining the principles of justice. Meanwhile, the effectiveness of the results of the management of community financial participation by the GUPPI Dinoyo Foundation is evidenced by the payment of salaries and allowances for teachers and employees of MI Islamiyah Dinoyo which reaches 92% of the funds raised.

Keywords: Effectiveness, Financial Participation, Islamic Education

Abstrak

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, masyarakat secara integral mempunyai peluang melakukan partisipasi finansial dalam pembiayaan pendidikan. Jenis partisipasi ini, peneliti temukan melalui Yayasan Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) sebagai organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan yang secara konsisten telah menghimpun dan mengelola anggaran dari wali murid untuk memastikan tersedianya gaji guru dan karyawan di MI Islamiyah Dinoyo. Melalui metode penelitian campuran dengan desain eksplorasi berantai, penelitian ini berusaha menganalisis efektivitas pengelolaan partisipasi finansial masyarakat oleh Yayasan GUPPI Dinoyo dalam mendukung pembiayaan Pendidikan di MI Islamiyah Dinoyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan partisipasi finansial masyarakat didukung oleh penerapan prinsip keterbukaan, sukarela, afirmasi kepada yang rumah tangga miskin, dan menjaga azas keadilan. Sementara efektivitas hasil pengelolaan partisipasi finansial masyarakat oleh Yayasan GUPPI Dinoyo dibuktikan dengan adanya pembayaran gaji dan

tunjangan guru dan karyawan MI Islamiyah Dinoyo yang mencapai 92% dari dana yang dihimpun.

Kata Kunci: Efektifitas, Partisipasi Finansial, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya tidak hanya sekedar hak warga negara, namun lebih dari itu ia adalah hak asasi setiap manusia. Demikianlah spirit yang dikandung dalam amandemen UUD 1945. Untuk menjamin hak setiap warga negara dan hak asasi manusia atas pendidikan. Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Melalui UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) pemerintah juga diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹ Namun demikian sampai hampir dua dekade desentralisasi kebijakan pendidikan, pemerintah pusat maupun daerah belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembiayaan satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah. Persoalan demikian menjadi semakin serius bila dikaitkan dengan sejumlah riset dampak desentralisasi pendidikan yang belum memberi hasil signifikan pada pencapaian prestasi peserta didik. Hasil penelitian Kumar mengungkap semakin maraknya keraguan akan kehandalan desentralisasi pendidikan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan suatu negara.²

Tahun 2020 telah terhitung lebih dari satu dekade pelaksanaan komitmen 20 persen APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Apalagi sejak era pemerintahan Presiden Jokowi masa jabatan kedua dimulai Tahun 2019, pemerintah menaruh fokus dan prioritas terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu titik berat perhatian pemerintah untuk sektor pendidikan semakin besar dan patut diapresiasi. Di sisi lain, problematika inheren dunia pendidikan di Indonesia adalah bagaimana kebijakan alokasi sumber daya keuangan yang sudah meningkat signifikan, namun beberapa indikator capaian kinerjanya masih stagnan. Secara statistik pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan bila dibandingkan pertumbuhan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.

¹ Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik alokasi melalui intervensi anggaran Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

² Kalyan Kumar Kameshwara et al., "A False Promise? Decentralization in Education Systems across the Globe," *International Journal of Educational Research* 104 (January 1, 2020): 101669, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101669>.

Sebagaimana analisis Mahudin, penggunaan anggaran pendidikan secara akumulatif pada tahun 2009 hingga 2019 telah mencapai Rp. 3.920,45 triliun. Pada tahun 2017, pertumbuhan APM secara rata-rata jika dipresentasikan pada jenjang SD sebesar 0,38% dan pada SMP sebesar 1,91%. Angka pertumbuhan ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan anggaran pendidikan pada tahun tersebut mencapai 9,52%.³

Di tengah perdebatan atas efektifitas komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan, Irianto mencatat beberapa bentuk inovasi orientasi pendidikan pasca reformasi dan desentralisasi telah dilaksanakan di Indonesia; 1) Aspek peningkatan mutu kelembagaan. 2) Aspek pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. 3) Aspek efisiensi manajemen 4) Aspek partisipasi masyarakat 5) Aspek Akuntabilitas.⁴ Bila kelima aspek tersebut disandingkan dengan realitas penyelenggaraan pendidikan saat ini, peneliti melihat bahwa kerangka inovasi pendidikan nasional mengalami kendala implementasina. Mutu kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari *political will* pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan untuk penerapan meritokrasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagaimana penelitian Zakariya bahwa pengambil kebijakan, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya di banyak Negara saat ini ditantang untuk menemukan strategi efektif tentang bagaimana mengidentifikasi, merekrut dan mendayagunakan tenaga pendidikan untuk mendukung pencapaian visi dan misi sekolah.⁵

Pemerataan pendidikan sangat diupayakan bila kesenjangan sosial dan ekonomi masih begitu tinggi di Indonesia. Anggaran pendidikan yang meningkat signifikan namun belum dapat secara efektif dialokasikan tepat sesuai dengan peruntukannya. Partisipasi masyarakat belum efektif karena komite sekolah sebagai saluran utamanya belum diposisikan dalam struktur organisasi sekolah dengan peran sebagaimana tugas dan fungsinya. Muara permasalahan tentu juga pada akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang masih bergantung pada kemauan baik pimpinan lembaga, belum pada kepatuhan regulasi pemerintah maupun peraturan organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan.

³ Fransina Natalia Mahudin, "Satu Dekade Anggaran Pendidikan 20 Persen," indonews, June 25, 2019, <https://indonews.id/artikel/21928/Satu-Dekade-Anggaran-Pendidikan-20-Persen/>.

⁴ Kholilur Rahman, "Inovasi Pendidikan Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 6, no. 2 (2018): 225–52, <https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.225-252>.

⁵ Yusuf F. Zakariya, K. Bjørkestøl, and H. K. Nilsen, "Teacher Job Satisfaction across 38 Countries and Economies: An Alignment Optimization Approach to a Cross-Cultural Mean Comparison," *International Journal of Educational Research* 101, no. April (2020): 101573, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101573>.

Kisaran permasalahan makro pendidikan yang demikian itu menjadikan partisipasi masyarakat dalam pendidikan memiliki pijakan yang kuat khususnya ketika melihat relasi simbiosis masyarakat dan dunia pendidikan. Kualitas pendidikan sebenarnya dapat ditopang secara efektif melalui partisipasi masyarakat, sehingga dapat dipahami bahwa intervensi publik dalam praksis pendidikan tak hanya soal objek pendidikan semata. White dan Barber misalnya, berargumen bahwa kerjasama dan relasi yang supportif antara komponen tri sentra pendidikan: keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki dampak yang sangat krusial.⁶ Apalagi melihat relasi sekolah dan masyarakat menurut Durkheim bisa cukup relevan menjadi referensi bagi terbangunnya komitmen masyarakat dalam mendukung keberadaan sekolah sampai saat ini. Pertama melalui pendidikan membentuk agar anak terikat pada lingkungan sosialnya. Mereka dididik untuk meyakini bahwa kekuatan masyarakat itu nyata dan mengendalikan kesadaran dan perilaku dirinya, dan anak didik harus diyakinkan bahwa masyarakat adalah bagian dirinya yang paling berharga. Kedua, sebagai sosiolog fungsionalis Durkheim memandang fungsi utama pendidikan pada masyarakat industri adalah untuk mentransmisikan nilai-nilai masyarakat, dan mengajarkan keterampilan ekonomi industri.⁷

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan paling terlihat pada kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam keberlangsungan sekolah. Bukan hanya siswa dan keluarga mereka, yang menginvestasikan waktu dan uang pada operasional sekolah. Namun semua anggota masyarakat secara kolaboratif melalui pembayaran pajaknya berinvestasi dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Menurut Meents, melalui pembayaran pajak oleh masyarakat demikian, memang bisa menjadi perwujudan partisipasi meski pada tingkatan atau kualitas rendah. Karena pembayar pajak sangat mungkin tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa pajak mereka berguna untuk menopang keberlangsungan pembangunan, khususnya program pendidikan nasional.⁸

Dalam manajemen berbasis sekolah, maka partisipasi masyarakat merupakan konsep kunci keberhasilan. Menurut Matshe dan Pitsoe, partisipasi publik dalam manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi publik dalam pendidikan adalah amanat konstitusional yang harus dilaksanakan dan dihormati

⁶ Michael Barber, John White, and Louise Stoll, *Perspectives on School Effectiveness and School Improvement* (London: Institute of Education, University of London, 1997).

⁷ Karl Thompson, “Durkheim’s Perspective on Education,” ReviseSociology, August 22, 2017, <https://revisesociology.com/2017/08/22/functionalist-durkheim-role-education/>.

⁸ Miranda Meents, “How Education Changes the World,” accessed December 31, 2020, <https://www.grad.ubc.ca/about-us/initiatives-plans-reports/how-education-changes-world>.

oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Sistem pendidikan akan kehilangan nilai jika orang tua sebagai pemangku kepentingan utama diabaikan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Masyarakat awam, khususnya kalangan miskin harus diberikan saluran partisipasi sebagai hak konstitusionalnya.⁹ Penghargaan atas aspirasi kalangan miskin bisa dijadikan petanda apakah sistem pendidikan nasional suatu negara masih menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa dikategorikan ke dalam lima jenis, yaitu partisipasi finansial, partisipasi akademis, partisipasi material, partisipasi kultural, dan partisipasi evaluative.¹⁰ Pertama, partisipasi finansial berkait erat dengan *support* masyarakat yang berbentuk pendanaan yang sesuai dengan kemampuan yang disepakati bersama. Termasuk juga keterlibatan aktif orang tua peserta didik yang secara kolektif secara sadar mendukung dan membantu pendanaan yang diperlukan oleh sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, perlu dicatat pula keterlibatan dan peran serta lembaga bisnis dan industri untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk kepentingan beasiswa pendidikan. Kedua, Partisipasi material, berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang realisasi pendidikan yang ideal. Jenis partisipasi ini dapat diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan dan infrastruktur pendidikan yang lain dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar pendidikan Islam. Partisipasi kategori ini, juga menuntut peran masyarakat dalam mendukung tercipta dan terpeliharanya lingkungan fisik yang kondusif, nyaman dan aman dalam suasana belajar.

Ketiga, partisipasi akademik, yaitu kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. *Support* ini diterjemahkan dalam bentuk dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah sekaligus lingkungan sosial di sekitarnya. Untuk keperluan peningkatan kapasitas *skill* atau kemampuan vokasional, lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk kontribusi akademik secara riil terhadap peserta didik. *Keempat*, partisipasi kultural mengandaikan bahwa nilai kultural dan moral menjadi tanggungjawab bersama, tak hanya lembaga pendidikan Islam, namun juga

⁹ Phillip F.A. Matshe and Victor J. Pitsoe, "Promotion of Public Participation in School Environment," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 4, no. 13 (2013): 643–51, <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n13p643>.

¹⁰ Rochmat Wahab, "Partisipasi Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan," *Dinamika Pendidikan* 7, no. 3 (2000), <https://journal.uny.ac.id/index.php/dinamika-pendidikan/article/view/5828>.

keluarga dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah proses transformasi kebudayaan selain transformasi keilmuan. Sehingga kelestarian kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi perhatian dan partisipasi aktif kedua belah pihak.

Kelima, partisipasi evaluatif. Tipologi partisipasi ini berkaitan dengan fungsi masyarakat sebagai “penikmat hasil pendidikan”, sehingga kualitas lulusan dan profil peserta didik tak bisa dilepaskan dari kontrol dan kendali masyarakat. Sebagai entitas sosial, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menjaga “mutu pendidikan”, baik proses maupun lulusannya. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan *feedback* sekaligus penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Pada saat bersamaan, publik juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam perancangan kebijakan kulikuler atau non kulikuler sekolah. Agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

Partisipasi finansial masyarakat di berbagai negara dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas), didorong pemerintah untuk memastikan tercapai tujuan akses pendidikan dasar. Data menunjukkan bahwa dana pemerintah untuk membiayai perluasan pendidikan berasal dari sejumlah sumber yang berbeda, tetapi secara khusus pajak di tingkat lokal memainkan peran penting. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, misalnya, rumah tangga menanggung bagian lebih besar dari pengeluaran pendidikan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada di tingkat yang lebih rendah. Tetapi di negara-negara berpenghasilan rendah bukan itu masalahnya. Malawi adalah contoh nyata: pendidikan tinggi hampir sepenuhnya disubsidi oleh negara, namun rumah tangga berkontribusi hampir 20% dari biaya pendidikan dasar.¹¹

Penghimpunan dana masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah tentu tidak sekedar karena adanya keterbatasan ketersediaan dana bersumber dari pemerintah. Tetapi juga karena orientasi peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar menuntut ketersediaan dana operasional sekolah tersedia secara cukup dan berlanjut. Di banyak riset kebijakan pendidikan membuktikan bahwa input kebijakan pendanaan pendidikan menunjukkan bahwa: Pertama, di tingkat sekolah, peningkatan prestasi pembelajaran siswa lebih efektif didorong melalui pembiayaan berorientasi peningkatan kualitas guru, daripada orientasi peningkatan sarana kelas.¹² Kedua, di tingkat rumah tangga, intervensi pemerintah melalui skema bantuan transfer tunai dalam program jaring

¹¹ Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina, “Financing Education,” *Our World in Data*, June 22, 2016, <https://ourworldindata.org/financing-education>.

¹² Roser and Ortiz-Ospina.

pengaman sosial mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah.¹³ Ketiga, sementara skema kebijakan beasiswa cenderung meningkatkan angka kehadiran dan prestasi siswa. Bantuan dana pendidikan intinya diberikan untuk mempermudah peserta didik memperoleh pendidikan dan meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini khususnya untuk meningkatkan motivasi belajar sebagai syarat yang mutlak bagi pembelajaran untuk dapat menggerakkan kemauan berupaya mencapai tujuan pembelajaran.¹⁴

Pada level mikro, kontribusi masyarakat ini bisa dilihat di setiap satuan pendidikan dalam hal ini sekolah. Sekolah memiliki perencanaan program yang bisa dilihat dari postur Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Di dalam setiap RAPBS, semestinya terlihat komponen partisipasi finansial masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan anggaran sekolah. Permasalahan efektivitas partisipasi finansial masyarakat khususnya muncul sebagaimana disinggung di muka adalah pada tingkat akuntabilitas pengambilan keputusan pimpinan lembaga sekolah dalam mendayagunakan anggaran yang diterima dari masyarakat maupun pemerintah. Adanya keyakinan kuat atas peran pimpinan sekolah, sebagai subjek aktif dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan cukup beralasan. Riset Martin dkk menunjukkan bahwa jajaran pimpinan sekolah yakni Kepala Sekolah dan Komite Sekolah selalu menyambut baik agenda kebijakan pemerintah, terutama dimotivasi oleh upaya mewujudkan tenaga pendidikan yang profesional sebagai faktor utama keberhasilan praktik pembelajaran peserta didik di sekolahnya¹⁵.

Dari penelitian Anwar, berbasis pengalaman organisasi, proses pengambilan keputusan dapat mengadopsi dari beragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari dinamika kehidupan berorganisasi.¹⁶ Olehnya proses pengambilan keputusan merupakan kesulitan tersendiri, karena kesalahannya akan berimplikasi pada permulaan dari sebuah risiko. Setiap keputusan mengandung sebuah risiko, yang mau atau tidak harus dihadapi, terutama bagi pengambil kebijakan tersebut. Sebagaimana di organisasi sekolah, apalagi dengan sumber daya anggaran yang terbatas, tentu untuk

¹³ Robert Albert Sparrow, *Health, Education and Economic Crisis* (Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2006), 195.

¹⁴ Farikhatal Nadiroh and Wahjoedi Wahjoedi, "Pengaruh Pemanfaatan Bantuan Dana Pendidikan Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2012 Universitas Negeri Malang," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (March 1, 2016): 22–29.

¹⁵ Jenny Martin et al., "Educational Leaders and the Project of Professionalisation in Early Childhood Education in Australia," *International Journal of Educational Research* 101 (2020): 101559, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101559>.

¹⁶ Herson Anwar, "Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah," *Nadwa* 8, no. 1 (April 19, 2014): 37–56, <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.569>.

mencapai tingkat efektifitas penggunaan anggaran diperlukan pengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab.

Idealitas keputusan di atas, lazim dilahirkan dari karakter personal yang cerdik, berani mengambil resiko, komunikatif dan tentu saja, tegas. Di dalam pengambilan keputusan organisasi sekolah, temuan Gali dan Schechter perlu diperhatikan, bahwa pimpinan lembaga pendidikan hendaknya mempertimbangkan teori institusi (*institutional theory*).¹⁷ Hasil riset keduanya menunjukkan bahwa lembaga pendidikan selalu mengalami perubahan. Pengelola sekolah harus mampu membangun kepercayaan publik terkait, secara bertanggungjawab mendayagunakan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, wewenang dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan kinerja sekolah. Lebih lanjut Gali dan Schechter menyimpulkan adanya kompleksitas dinamika dan proses penguatan dukungan kemitraan intersektoral antara Kementerian Pendidikan, LSM dan Kepala sekolah. Jajaran pimpinan sekolah dengan otonomi yang diberikan pemerintah hendaknya mampu menjaga jejaring eksternal untuk memastikan tercapainya tujuan sekolah, sekaligus ragam kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, semakin besarnya keterlibatan faktor eksternal (publik) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pimpinan sekolah perlu secara berkelanjutan menjaga kemitraan.

Oleh karena itu, efektifitas anggaran sekolah bisa diukur dari akuntabilitas publik pimpinan sekolah ataupun pengurus badan hukum penyelenggara pendidikan dalam mencapai target kinerja organisasi. Menurut Fauziyyah, efektifitas ditelisik dari ketercapaian target yang telah direncanakan, yang didukung oleh penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Bisa dipahami bahwa penekanan penting dalam konteks efektifitas dalam bahasan ini. Sehingga manajemen keuangan dapat diklaim ideal-efektif manakala telah mampu mengelolah keuangan untuk membiayai aktifitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.

Berkenaan dengan target kinerja organisasi publik yang dikaitkan dengan efektifitas penggunaan anggaran, maka perlu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI tentang Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam konteks ini, bisa digunakan pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan ini memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Keterkaitan antara target sasaran dengan rasio pendanaan kegiatan;

¹⁷ Yarden Gali and Chen Schechter, “NGO Involvement in Education Policy: Principals’ Voices,” *International Journal of Educational Management* 34, no. 10 (January 1, 2020): 1509–25, <https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2020-0115>.

2. Manfaat sekaligus harapan yang diharapkan; dan
3. Pencapaian hasil dan keluaran yang direalisasikan secara efisien-efektif.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mohammad Mahsun, sebagaimana dikutip Sumual, meliputi aspek-aspek, antara lain:¹⁸

1. Kelompok masukan (*input*); berkait erat dengan segala hal yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang baik.
2. Kelompok proses (*process*); berkaitan dengan tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, baik dari segi kecepatan maupun ketepatan.
3. Kelompok keluaran (*output*); sesuatu yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) dapat dijadikan sebagai indikator yang diharapkan.
4. Kelompok hasil (*outcome*); yang meliputi fungsi jangka menengah dengan efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*); sesuatu yang terkait dengan aspek kebermanfaatan keluaran sebagai indikasi tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*); yang melingkupi pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

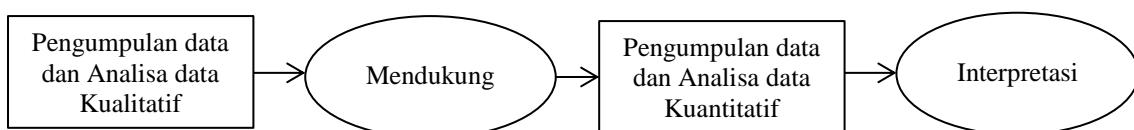
Secara garis besar penelitian ini berangkat dari upaya menggambarkan keterkaitan antara problematika pembiayaan pendidikan Islam dengan upaya penyelenggara pendidikan dalam mengusahakan efektifitas penggunaan anggaran yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Untuk mengidentifikasi keterkaitan keduanya, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus terhadap upaya-upaya empirik di tingkatan mikro pada Yayasan GUPPI Desa Dinoyo Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan.

Metode Penelitian

Untuk menghimpun temuan, analisis sampai pada penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan desain metode campuran (*mixed method*). Salah satu justifikasi penggunaan *mixed method* adalah peneliti mengumpulkan data kuantitatif setelah sebelumnya melakukan eksplorasi kualitatif. Mengacu pada Cresswell bahwa pertimbangan mendasar penggunaan desain *mixed method* ini untuk mengelaborasi data kualitatif dan kuantitatif dalam riset ini untuk mendukung kompleksitas data yang

¹⁸ Christian D. Sumual, Lintje Kalangi, and Natalia Y. T. Gerungai, “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 782–91, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18133.2017>.

diperlukan.¹⁹ Desain penelitian ini, mempunyai prosedur yang terdiri dari secara bertahap melalui proses pengumpulan, analisis, serta mencampur data kuantitatif dan kualitatif dalam studi tunggal atau dalam serangkaian studi multi-fase. Karena penelitian ini berkenaan dengan eksplorasi fenomena sosial pendidikan, maka peneliti menerapkan *mixed method* dengan desain eksplorasi berantai (*Exploratory Sequential Design*). Menurut Creswell untuk desain *mixed method* eksplorasi berantai, kerangka kerjanya adalah bagaimana peneliti mengumpulkan data kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena, dan selanjutnya mengumpulkan data kuantitatif untuk menjelaskan hubungan yang ditemukan dalam kualitatif data.



Gambar 1. Penelitian Metode Campuran: Desain Eksplorasi Berantai

Pengumpulan dan analisis deskriptif kualitatif dilakukan pada data hasil wawancara dengan tiga orang informan yaitu Ketua Pengurus Yayasan GUPPI Dinoyo, Bendahara Pengurus Yayasan GUPPI Dinoyo dan Koordinator Badan Administrasi Keuangan Madrasah (BAKM) Yayasan GUPPI Dinoyo. Analisis data kualitatif khusus dipergunakan untuk menggambarkan derajat keberhasilan Yayasan GUPPI Dinoyo sebagai organisasi publik dalam menyediakan pelayanan pendidikan masyarakat sesuai visi dan misi organisasinya.

Analisis deskriptif kuantitatif penelitian ini dilakukan pada data yang dikumpulkan melalui studi dokumen Laporan Keuangan Yayasan GUPPI Dinoyo Tahun Ajaran 2019/2020. Pada tahap ini peneliti menganalisis efektivitas partisipasi finansial pendidikan masyarakat dengan menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran dikali 100%.²⁰ Diasumsikan bahwa semakin tinggi persentase realisasi anggaran menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik atau efektif. Penghitungan persentase menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Alokasi Anggaran}} \times 100\%$$

¹⁹ John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Pearson, 2012), 535–41.

²⁰ Sumual, Kalangi, and Gerungai, “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon.”

Pembahasan

Yayasan Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) Desa Dinoyo, Kecamatan Deket, Lamongan adalah cabang Yayasan GUPPI Indonesia yang berdiri sejak Tahun 1950. Misi Yayasan GUPPI adalah terbentuknya manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Misi GUPPI ini diterjemahkan dalam tujuan organisasi untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa melalui jalur pendidikan baik formal maupun nonformal.

Misi dan tujuan GUPPI ini bisa memberikan gambaran bagaimana preferensi masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Durkheim melalui pendidikan masyarakat berupaya melanggengkan dan memperkuat homogenitas dengan menanamkan pada anak-anak sejak dini nilai, norma, tata susila yang harus sama-sama dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pranata pendidikan, masyarakat berupaya menanamkan rasa solidaritas sosial dalam diri individu - menanamkan rasa sebagai bagian dari masyarakat luas (*sense of belonging*), menanamkan komitmen atas pentingnya gotong royong untuk mewujudkan tujuan bersama, dan perasaan bahwa kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu.²¹

Sejak didirikan di Desa Dinoyo pada Tahun 1980, sejalan dengan mandat organisasi GUPPI pusat, GUPPI Dinoyo menaungi lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Desa Dinoyo bekerjasama dengan Pemerintah Desa Dinoyo. Keberadaan Yayasan GUPPI Desa Dinoyo tidak terlepas dari dukungan aparatur desa dan perorangan seperti para kiai, tokoh pendidikan dan para guru agama sampai masyarakat luas. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, setiap empat tahun Pengurus GUPPI Desa Dinoyo ditetapkan melalui musyawarah pemerintah desa Dinoyo.²² Perkembangan MI Islamiyah Desa Dinoyo memang tidak serta merta berada dalam koordinasi Pemerintah Desa Dinoyo. Pada awalnya lebih merupakan hasil prakarsa tokoh agama setempat yang berupaya memformalkan aktifitas pembelajaran baca tulisan Al-Qur'an di sejumlah masjid sekitar Desa Dinoyo. Sebagaimana sejarah perkembangan madrasah di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, seperti dicatat oleh Daun dan Arjman bahwa secara historis, pendidikan di dunia muslim lebih merupakan lembaga swasta yang mandiri, tidak terikat dengan kewenangan ataupun dukungan pemerintah seperti saat ini.

²¹ Thompson, "Durkheim's Perspective on Education."

²² MA, Wawancara dengan Ketua Pengurus, May 1, 2020.

Meski pula saat ini pun masih banyak pendidikan Islam yang berlangsung tanpa keterlibatan negara. Dalam bentuk formalnya saat ini, madrasah telah masuk dalam tanggung jawab otoritas negara dengan mengajarkan mata pelajaran sekuler (ilmu-ilmu pengetahuan alam, matematika, maupun ilmu non Islam lainnya).²³

Sebagaimana termuat dalam peraturan organisasi GUPPI Dinoyo yang ditetapkan Kepala Desa Dinoyo, dengan tetap menyelaraskan dengan mandat organisasi GUPPI pusat. Maka visi GUPPI Desa Dinoyo adalah mengantarkan masyarakat Islam berpendidikan, berbudaya, berkepribadian, dan berakhhlak luhur. Berdasarkan visi ini kemudian ditetapkan misi: 1) Meningkatkan pendidikan dan pengajaran pada semua unit pendidikan di bawah GUPPI Desa Dinoyo. 2) Membentuk manusia muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara. 3) Membendung kebudayaan yang bertentangan dengan Islam atau kepribadian manusia. 4) Mengantarkan anak yatim piatu, dan fakir miskin sebagai bagian muslim yang berpendidikan dan bermartabat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut tersebut, Pengurus GUPPI Dinoyo bersama Pemerintah Desa Dinoyo menetapkan ruang lingkup kegiatan: 1) Mendirikan dan merawat gedung-gedung madrasah yang menjadi unit pendidikan GUPPI Desa Dinoyo. 2) Mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar terutama di madrasah yang menjadi unit pendidikan GUPPI Desa Dinoyo. 3) Mengadakan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan di dalam atau luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. 4) Membentuk kader-kader remaja yang bermental Islam. 5) Memberikan beasiswa dan santunan pada anak yatim piatu, dan fakir miskin. 6) Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi Badan Pengurus MI Islamiyah Desa Dinoyo dan masyarakat.²⁴

Aktifitas kepengurusan Yayasan GUPPI Dinoyo bisa dipandang sebagai partisipasi yang berkualitas. Menurut Normina, partisipasi berkualitas diindikasikan dari keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.²⁵ Bila mengacu pada 4 kategori partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu: partisipasi finansial,

²³ Holger Daun and Reza Arjmand, *Handbook of Islamic Education* (Springer International Publishing, 2018).

²⁴ Ketua Pengurus and Kepala Desa Dinoyo, “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga GUPPI Desa Dinoyo,” 2011, 2–3.

²⁵ Normina Normina, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan,” *ITTIHAD* 14, no. 26 (December 29, 2016), <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>.

partisipasi akademis, partisipasi material, partisipasi kultural, dan partisipasi evaluatif, maka analisis aktifitas Pengurus Yayasan GUPPI Dinoyo memperlihatkan adanya pemahaman pengurus terhadap variabel-variabel penyelenggaraan sekolah sebagai pijakan pengambilan kebijakan lembaga. Pada temuan-temuan berdasar hasil wawancara dan analisis dokumen program kerja pengurus, bisa digambarkan Tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Program Kerja Berdasarkan 4 Tipologi Partisipasi Pendidikan

No.	Tipologi partisipasi	Program Kerja Pengurus GUPPI
1.	Partisipasi Finansial	Penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dan wali murid untuk memenuhi gaji/tunjangan guru MI.
2.	Partisipasi Akademis	Penyediaan tenaga supervisi pendidikan, workshop pengajaran, dan monitoring/evaluasi KBM MI.
3.	Partisipasi Material	Penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dan pemerintah (desa, kab, provinsi, pusat) untuk membangun sarana/prasarana MI.
4.	Partisipasi Kultural	Pemberian arahan kepada guru-guru MI mengenai etika profesi keguruan MI untuk menyesuaikan diri dengan kultur religius desa-desa di sekitar MI.
5.	Partisipasi Evaluatif	Pelaksanaan evaluasi KBM dan program kerja pengurus GUPPI maupun MI setiap akhir semester, untuk terbitnya rekomendasi peningkatan kualitas KBM sesuai aspirasi masyarakat.

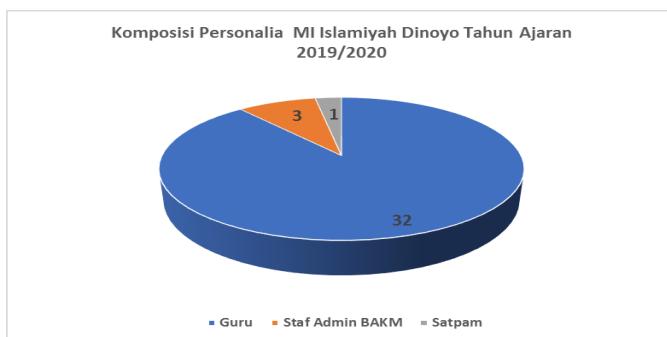
Partisipasi masyarakat yang diwadahi dalam program kerja pengurus GUPPI dalam penyelenggaraan pendidikan juga memenuhi tiga definisi mendasar, yaitu keterlibatan mental emosional, adanya kontribusi, dan tanggung jawab. Artikulasi partisipasi masyarakat dapat direalisasikan antara lain melalui: sumbangan sumber daya baik benda maupun tenaga; keterlibatan dalam hal perencanaan dan koordinasi, hal ini menjadi bukti partisipasi aspek mental dan pola pikir; serta terlibat langsung dalam penyusunan program dan pelaksanaannya yang merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab yang diemban.²⁶

Bila dikhkususkan pada partisipasi pemenuhan kebutuhan finansial, maka bisa dilihat kebijakan dalam anggaran rumah tangga (ART) GUPPI Dinoyo, khususnya pada Bab Sumber Dan Pengelolaan Keuangan. Pasal 9 ART menyatakan bahwa sumber pendapatan GUPPI Dinoyo terdiri dari: infak wali siswa, infak donatur non wali siswa, bantuan masyarakat, dan bantuan instansi pemerintah dan swasta. Salah satu implementasi kebijakan keuangan tersebut adalah pada penetapan Pengurus GUPPI

²⁶ Abdul Karim, "Efektivitas Partisipasi Perempuan Pada Pendidikan Non Formal Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (June 1, 2017): 119–40, <https://doi.org/10.18326/infls13.v1i1.119-140>.

Dinoyo untuk adanya kewajiban wali murid membayar sedekah sejak Tahun 2016. Penetapan iuran wali murid ini didasarkan pada semakin meningkatnya jumlah siswa MI Islamiyah Dinoyo yang telah meningkat dari hanya 60 siswa di Tahun 2006, menjadi 246 siswa di Tahun 2016 dan saat ini mencapai 305 siswa. Karena itu diperlukan jumlah guru yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan jumlah 32 orang, 3 staf Badan Administrasi Keuangan Madrasah (BAKM), dan Satpam, maka setiap bulan diperlukan anggaran yang cukup banyak. Menurut SM, Bendahara Pengurus, bahwa sejak Tahun 2016 mengenakan iuran wajib kepada wali murid, di mana sebelumnya hanya bersifat sukarela, tidak rutin setiap bulan dan tanpa ada batasan jumlah iuran.²⁷

Grafik 1. Komposisi Personalia MI Islamiyah Dinoyo



Alasan iuran wajib wali murid atau disebut sedekah wajib dikarenakan beberapa hal. Pertama bahwa dipandang kebijakan Yayasan GUPPI Dinoyo dengan gratis SPP tidak mampu lagi mendukung semakin besarnya kebutuhan anggaran gaji guru yang semakin banyak dibutuhkan, seiring semakin banyaknya siswa di MI Islamiyah Dinoyo. Kedua, meski secara nominal ada kenaikan jumlah dana terhimpun dari sumbangan sukarela, namun dibandingkan kenaikan jumlah kebutuhan dana sarana dan gaji guru setiap tahun, maka sumbangan dana masyarakat yang diterima Yayasan GUPPI dirasakan semakin kecil. Ketiga, karena bantuan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus direalisasikan sesuai peraturan yang ada, di mana tidak memungkinkan pihak Yayasan GUPPI mengalokasikannya untuk penggajian guru.²⁸

Selain itu, partisipasi finansial wali murid diperlukan melihat indikator besaran BOS tidak mungkin mampu membiayai pembangunan ruang kelas dan sarana lain seperti: lapangan olahraga, tempat ibadah, sanitasi sekolah dan meubeler, sebagai pendukung ketercapaian pembelajaran bermutu. Seperti halnya temuan Fauziyyah dkk

²⁷ SM, Wawancara Bendahara Pengurus, May 12, 2020.

²⁸ SM.

bahwa meski tujuan BOS dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, namun harapan ini belum bisa optimal direalisasikan disebabkan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mendukung program yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan.²⁹

Di tengah persaingan antar sekolah di Lamongan, kebijakan pengenaan “sedekah wajib” kepada wali murid MI Islamiyah Dinoyo, bisa dikatakan sebagai keputusan berani jajaran Pengurus GUPPI Dinoyo untuk pembiayaan pendidikan mandiri dari wali santri yang dikhkususkan untuk pembiayaan gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MI Islamiyah Dinoyo. Menurut M.A, kebijakan berani ini ditempuh juga termotivasi karena, pertama jajaran pengurus tidak tega melihat *bisyaroh* yang diterima guru dan karyawan MI Islamiyah Dinoyo yang masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan. Kedua, tidak mungkin bicara pendidikan berkualitas kalau tidak dibarengi dengan kelayakan tingkat kesejahteraan jajaran pendidiknya.³⁰

Mengenai tata aturan pembayaran, menurut MEY, Koordinator BAKM, sedekah wajib yang dihimpun Yayasan GUPPI Dinoyo dibayarkan setiap bulan dengan pilihan jumlah uang yang telah disepakati pengurus bersama wali murid di awal tahun ajaran. Untuk asas keadilan, besarnya sedekah wajib tidak sama antar wali murid. Pada saat mendaftarkan anaknya, wali murid diminta memilih dan menyepakati besaran pilihan yaitu: Pilihan 1 : Rp 40.000, Pilihan 2: Rp 60.000, Pilihan 3: Rp 80.000 dan Pilihan 4 di = > Rp 100.000. Berdasarkan empat pilihan tersebut, wali murid dibebaskan untuk memilih sesuai kemampuan ekonomi keluarga wali murid.³¹ Selain dimaksudkan untuk asas keadilan, dalam perspektif analisis kebijakan maka pemberian peluang pilihan besaran iuran wali murid bisa dikatakan sebagai kebijakan afirmasi. Konseptualisasi kebijakan afirmasi dapat dipahami sebagai pemberlakuan kebijakan atau perlakuan yang berbeda untuk mendorong pencapaian hasil yang merata.³² Upaya pencapaian kondisi pemerataan bisa juga dipahami sebagai kondisi yang tidak memberatkan atau merugikan satu pihak dalam upaya pencapaian tujuan kelembagaan.

²⁹ Nur Azizah Fauziyyah, Heni Mulyani, and Imas Purnamasari, “Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15828>.

³⁰ MA, Wawancara dengan Ketua Pengurus.

³¹ Mey, Wawancara, May 2020.

³² Bambang Sunaryo, “Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Berbasis Merit,” *Civil Service Journal* 8, no. 1 Juni (2014), <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/75>.

Implikasi dari kebijakan afirmasi oleh Pengurus GUPPI Dinoyo, di mana dilakukan penyepakatan dalam penetapan pilihan besaran iuran bersama wali murid MI Dinoyo, dapat pula menjadi referensi upaya mengatasi hambatan partisipasi pendidikan masyarakat, di antaranya:

1. Adanya fasilitasi pengurus yayasan GUPPI dalam bentuk forum dialog terbuka antara pihak sekolah dengan wali murid, mengatasi budaya *pakewuh* masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pihak sekolah.
2. Wali murid sebagai bagian dari masyarakat diakui sebagai *stake holder* penting dalam penyelenggaraan pendidikan, bisa mengatasi problem apatisme masyarakat yang selama ini hanya beranggapan bahwa mereka adalah sekedar objek atau sasaran kebijakan saja.
3. Adanya kebijakan afirmasi dalam iuran wali murid, bisa mendulang kepercayaan masyarakat kepada pengambil kebijakan (Pengurus GUPPI Dinoyo) karena masyarakat merasa aspek-aspek kebijakan sudah disusun sedemikian rupa, menyesuaikan dengan situasi dan ragam aspirasi sosial.

Dalam perumusan kebijakan organisasi, pengurus GUPPI Dinoyo memandang semua elemen yang ada dalam masyarakat sebagai bagian dari apa yang disebut dengan *stake holders* atau pemilik kepentingan kebijakan organisasi publik. Menurut Ali, semua *stake holders*, di posisi manapun tetap harus diperlakukan sama sebagai bagian dari warga negara. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan respon terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dan hendak dicarikan pemecahannya. Semua kegiatan kebijakan publik adalah untuk mencapai tujuan itu dan semua warga negara memiliki kompetensi yang sama untuk terlibat.³³

Dalam laporan keuangan Yayasan GUPPI periode tahun ajaran 2019-2020, meski terdapat potensi penerimaan sedekah wajib dari 305 wali murid kelas I sampai dengan wali murid kelas VI, namun tidak semua wali santri dikenakan pembayaran sedekah wajib. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, dari 305 wali murid, sebanyak 283 atau 93% wali murid dikenakan pembayaran sedekah, dan sebanyak 22 wali murid tidak dikenakan sedekah karena diberikan fasilitas pembebasan pembayaran (beasiswa) karena alasan berikut ini: 1). Keluarga miskin, yang dibuktikan dengan penyerahan surat keterangan miskin dari pemerintah desa, 2) pembebasan pembayaran untuk anak guru MI Islamiyah Dinoyo, dan 3) beasiswa untuk keluarga yang mengalami musibah

³³ Madekhan Ali, *Orang desa: anak tiri perubahan* (Malang: Averroes Press, 2007).

atau kerentanan sosial lainnya, sebagaimana pertimbangan ketua pengurus dan Kepala Desa Dinoyo.³⁴

Tabel 2. Kriteria dan Jumlah Pembayar Sedekah Yayasan GUPPI Desa Dinoyo Tahun Ajaran 2019/2020³⁵

Kriteria Sedekah	Jumlah	Prosentase
Di atas 100.000	15	5%
Rp. 80.000	9	3%
Rp. 60.000	60	20%
Rp. 40.000	199	65%
Beasiswa Miskin	11	4%
Beasiswa anak Guru	5	2%
Beasiswa Lain	6	2%
Jumlah Wali Murid	305	100%

Sebagaimana dikutip Fauziyyah, Akdon berargumen bahwa pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perolehan pendapatan yang selanjutnya dipergunakan membiayai program pendidikan yang telah ditetapkan.³⁶ Penghimpunan dana partisipasi wali murid dilaksanakan Yayasan GUPPI Dinoyo dilakukan pada setiap awal bulan, di mana pembayaran sedekah oleh wali murid diserahkan langsung kepada staf Badan Administrasi Keuangan Madrasah (BAKM). Selanjutnya staf BAKM menyetorkan kepada Bendahara Pengurus Yayasan GUPPI untuk dilakukan pengeluaran anggaran sesuai alokasi yang ditetapkan.

Tabel 3. Efektivitas Pengeluaran Anggaran Partisipasi Wali Murid MI Islamiyah Dinoyo 2019/2020

Bulan	Hasil partisipasi dana wali murid	Pengeluaran gaji/tunjangan guru dan karyawan	Tingkat efektivitas
Jul-19	13.488.500	11.292.000	84%
Agu-19	18.790.000	11.340.000	60%
Sep-19	12.480.000	14.077.500	113%
Okt-19	15.290.000	15.202.500	99%
Nov-19	15.560.000	14.577.500	94%
Des-19	10.860.000	14.122.500	130%
Jan-20	13.290.000	14.162.500	107%
Feb-20	13.760.000	14.015.000	102%
Mar-20	8.990.000	13.887.500	154%
Apr-20	16.200.000	14.350.000	89%
Mei-20	21.890.000	11.695.000	53%
Jun-20	12.940.000	11.400.000	88%

³⁴ MA, Wawancara dengan Ketua Pengurus.

³⁵ "Laporan Keuangan Pengurus Yayasan GUPPI Desa Dinoyo Tahun Ajaran 2019/2020," 2019.

³⁶ Fauziyyah, Mulyani, and Purnamasari, "Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung."

Rata – Rata / Bulan	14.461.542	13.343.500	92%
Total / Tahun (Rp)	173.538.500	160.122.000	92%

Seperti terlihat pada tabel 3, setiap bulan rata-rata bisa dihimpun dana Rp. 14,4 juta di mana oleh Bendahara Yayasan GUPPI dialokasikan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 13,3 juta untuk pos pengeluaran gaji pokok dan tunjangan guru (jam mengajar, tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja), gaji staf BAKM dan gaji satpam. Sementara selisih lebih penghimpunan dana wali santri ini dimasukkan dalam saldo yang dilaporkan pada setiap akhir bulan.

Penggunaan anggaran dikatakan tidak efektif manakala tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka sebaliknya dikatakan efektif apabila berkesesuaian dengan kegiatan yang telah diprogramkan.³⁷ Pengelolaan partisipasi finansial pendidikan masyarakat yang telah dihimpun Yayasan GUPPI Dinoyo dipandang efektif bila mengacu pada realisasi penggunaan dana yang ada diperuntukkan memenuhi gaji/tunjangan guru MI Islamiyah Dinoyo, khususnya dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa. Mengacu pula pada pendapat Mahmudi bahwa efektifitas merujuk pada akurasi ketercapaian suatu operasi pada sektor publik sehingga dikatakan efektif apabila aktifitas tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat (*public service*) yang tepat sasaran.³⁸

Sebagaimana Grafik 3 di atas, hasil penghimpunan dana partisipasi wali murid diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan personalia MI Islamiyah Dinoyo. Pengalokasian dana tersebut sesuai dengan tujuan penetapan kebijakan sedekah wajib oleh Pengurus Yayasan GUPPI Dinoyo sejak Tahun 2016 yang harus dialokasikan untuk gaji dan tunjangan sebagai berikut;

1. Gaji pokok, merupakan uang yang dibayarkan setiap bulan dalam jumlah tetap dan sama untuk setiap tenaga pendidik berdasarkan ketetapan pengurus.
2. Tunjangan fungsional atau tunjangan jam mengajar, adalah uang yang dibayarkan per jam mengajar untuk setiap bulannya.
3. Tunjangan jabatan adalah hak finansial yang diberikan kepada pegawai yang memiliki jabatan tertentu.

³⁷ Fauziyyah, Mulyani, and Purnamasari.

³⁸ Mahmudi (S.E.), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2nd ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 142.

4. Tunjangan masa kerja, adalah tunjangan yang diperoleh tenaga pendidik yang besar kecilnya dipengaruhi oleh masa kerja dihitung sejak terjadinya perjanjian kerja.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efektifitas yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran dikalikan 100%, maka persentase realisasi anggaran sampai akhir tahun pelajaran 2019/2020 setiap bulan rata-rata mencapai 92% dari total pemasukan. Tingginya persentase realisasi anggaran tahun pelajaran 2019/2020 menunjukkan pencapaian indikator kinerja pengelolaan partisipasi finansial wali murid oleh Yayasan GUPPI dalam kategori sangat efektif karena hasil yang didapat berada di atas rata-rata 90%-100%.

Tercapainya efektifitas demikian, juga tidak terlepas dari adanya dokumen APBS MI Islamiyah Dinoyo yang ditetapkan bersama antara ketua pengurus GUPPI dengan kepala MI Islamiyah Dinoyo. Penetapan APBS yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan sekolah demikian, menjadikan kepala sekolah memiliki pedoman kerja dan tujuan yang jelas dalam berbagai program pengembangan kualitas madrasah. Kondisi ideal demikian, seperti ditekankan Maisaroh dari hasil penelitiannya di Yogyakarta bahwa tujuan sekolah harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga mampu berkontribusi – pemikiran dan sumberdaya lain, untuk sekolah mampu meningkatkan kualitasnya.³⁹ Relasi manajerial sekolah dan masyarakat ini, hendaknya terus dikembangkan dengan baik agar sekolah mampu menyusun dan melaksanakan program dengan sumber daya anggaran yang tersedia. Tentunya, untuk efektifitas penganggaran sekolah, maka APBS harus disusun oleh pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat, baik di jajaran pimpinan sekolah maupun masyarakat (komite sekolah).

Penutup

Partisipasi finansial masyarakat melalui Yayasan GUPPI Dinoyo diberikan wali murid dengan prinsip terbuka, sukarela, dengan pilihan besar pembayaran sebagai bentuk afirmasi kepada yang rumah tangga miskin dan menjaga asas keadilan kontribusi pembiayaan pendidikan antar wali murid. Implementasi kebijakan demikian memberikan derajat keberhasilan Yayasan GUPPI Dinoyo sebagai organisasi publik

³⁹ Siti Maisaroh, Slamet PH, and Samsul Hadi, “The Budget Planning Determinant Factors at State Primary Schools in Yogyakarta Province,” *International Journal of Instruction* 12, no. 2 (2019): 353–68, <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12223a>.

dalam menyediakan pelayanan pendidikan masyarakat sesuai visi-misi dan target program kerja organisasi.

Hasil pengelolaan partisipasi finansial masyarakat oleh Yayasan GUPPI Dinoyo menunjukkan efektifitas dalam mendukung pembiayaan Pendidikan MI Islamiyah Dinoyo. Hal ini diindikasikan dengan tujuan adanya iuran sedekah wajib dari wali murid yang ditetapkan oleh Pengurus GUPPI Dinoyo tercapai untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru dan karyawan MI Islamiyah Dinoyo. Setiap bulan tingkat pengeluaran atau realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru dan karyawan mencapai 92% dari dana yang dihimpun dari partisipasi wali murid.

Daftar Rujukan

- Ali, Madekhan. *Orang desa: anak tiri perubahan*. Malang: Averroes Press, 2007.
- Anwar, Herson. "Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah." *Nadwa* 8, no. 1 (April 19, 2014): 37–56. <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.569>.
- Barber, Michael, John White, and Louise Stoll. *Perspectives on School Effectiveness and School Improvement*. London: Institute of Education, University of London, 1997.
- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson, 2012.
- Daun, Holger, and Reza Arjmand. *Handbook of Islamic Education*. Springer International Publishing, 2018.
- Fauziyyah, Nur Azizah, Heni Mulyani, and Imas Purnamasari. "Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15828>.
- Gali, Yarden, and Chen Schechter. "NGO Involvement in Education Policy: Principals' Voices." *International Journal of Educational Management* 34, no. 10 (January 1, 2020): 1509–25. <https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2020-0115>.
- Kameshwara, Kalyan Kumar, Andres Sandoval-Hernandez, Robin Shields, and Kanika Rai Dhanda. "A False Promise? Decentralization in Education Systems across the Globe." *International Journal of Educational Research* 104 (January 1, 2020): 101669. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101669>.
- Karim, Abdul. "Efektivitas Partisipasi Perempuan Pada Pendidikan Non Formal Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (June 1, 2017): 119–40. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i1.119-140>.
- Ketua Pengurus and Kepala Desa Dinoyo. "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga GUPPI Desa Dinoyo," 2011.
- "Laporan Keuangan Pengurus Yayasan GUPPI Desa Dinoyo Tahun Ajaran 2019/2020.," 2019.

MA. Wawancara dengan Ketua Pengurus, May 1, 2020.

Mahmudi (S.E.). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Mahudin, Fransina Natalia. "Satu Dekade Anggaran Pendidikan 20 Persen." indonews, June 25, 2019. <https://indonews.id/artikel/21928/Satu-Dekade-Anggaran-Pendidikan-20-Persen/>.

Maisaroh, Siti, Slamet PH, and Samsul Hadi. "The Budget Planning Determinant Factors at State Primary Schools in Yogyakarta Province." *International Journal of Instruction* 12, no. 2 (2019): 353–68. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12223a>.

Martin, Jenny, Joce Nuttall, Linda Henderson, and Elizabeth Wood. "Educational Leaders and the Project of Professionalisation in Early Childhood Education in Australia." *International Journal of Educational Research* 101 (2020): 101559. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101559>.

Matshe, Phillip F.A., and Victor J. Pitsoe. "Promotion of Public Participation in School Environment." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 4, no. 13 (2013): 643–51. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n13p643>.

Meents, Miranda. "How Education Changes the World." Accessed December 31, 2020. <https://www.grad.ubc.ca/about-us/initiatives-plans-reports/how-education-changes-world>.

Mey. Wawancara, May 2020.

Nadiroh, Farikhatul, and Wahjoedi Wahjoedi. "Pengaruh Pemanfaatan Bantuan Dana Pendidikan Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2012 Universitas Negeri Malang." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (March 1, 2016): 22–29.

Normina, Normina. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." *ITTIHAD* 14, no. 26 (December 29, 2016). <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>.

Rahman, Kholilur. "Inovasi Pendidikan Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 6, no. 2 (2018): 225–52. <https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.225-252>.

RI, Pemerintah. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

Roser, Max, and Esteban Ortiz-Ospina. "Financing Education." *Our World in Data*, June 22, 2016. <https://ourworldindata.org/financing-education>.

SM. Wawancara Bendahara Pengurus, May 12, 2020.

Sparrow, Robert Albert. *Health, Education and Economic Crisis*. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2006.

Sumual, Christian D., Lintje Kalangi, and Natalia Y. T. Gerungai. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 782–91. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18133.2017>.

Sunaryo, Bambang. "Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Berbasis Merit." *Civil*

Service Journal 8, no. 1 Juni (2014).
<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/75>.

Thompson, Karl. "Durkheim's Perspective on Education." ReviseSociology, August 22, 2017. <https://revisesociology.com/2017/08/22/functionalist-durkheim-role-education/>.

Wahab, Rochmat. "Partisipasi Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan." *Dinamika Pendidikan* 7, no. 3 (2000). <https://journal.uny.ac.id/index.php/dinamika-pendidikan/article/view/5828>.

Zakariya, Yusuf F., K. Bjørkestøl, and H. K. Nilsen. "Teacher Job Satisfaction across 38 Countries and Economies: An Alignment Optimization Approach to a Cross-Cultural Mean Comparison." *International Journal of Educational Research* 101, no. April (2020): 101573. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101573>.